

Pengimplementasian nilai pancasila guna menekan pertumbuhan ekonomi bangsa

Ahlam Dita Putri

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ditaahlam@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila; Ekonmi Bangsa;
Ekonomi Pancasila

Keywords:

Pancasila; Nation's
Economy; Pancasila
Economy;

ABSTRAK

Sistem Ekonomi di Indonesia yang belum juga membawa hasil yang memuaskan sering menjadi bahan pembahasan, baik dikalangan masyarakat ataupun dikalangan pemerintah. Sering dipertanyakan mengapa hal ini terjadi dan tidak kunjung selesai. Meskipun telah ditemukan penyebabnya, tetapi Sistem Ekonomi Di Indonesia belum juga ada perkembangan. Sehingga didapatkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yakni menanamkan rasa cinta pada masyarakat Indonesia terhadap produk lokal yang akan membawa banyak keuntungan bagi Ekonomi Bangsa. Dan dibutuhkan dorongan pemerintah untuk membantu mewujudkan produk lokal yang berkualitas dan memiliki inovasi. Sehingga akan membawa perubahan terhadap Sistem Ekonomi di Indonesia.

ABSTRACT

System of Economics in Indonesia is also lacking results that consistently serve as a basis for discussion, whether among the general populace or the government. Serious questions are being asked about why this incident occurred and did not end. Even though the cause has been identified, the Indonesian economic system has not yet seen any consequences. So that was the outcome of the study that had been conducted, which was to highlight the sentiment of cynicism that the Indonesian populace had against a local product that would generate a lot of benefits for the Indonesia's economy. And you need the government to help you push for local goods that are high-quality and innovative. This will bring about changes to Indonesia's economic system.

Pendahuluan

Pancasila adalah dasar negara bagi negara Indonesia. Yang mana segala sesuatu termasuk hukum, Pendidikan, dan hal lain di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dalam menjadi pedoman negara mempunyai falsafah khusus yang sudah mandarah daging dalam diri negara Indonesia, bahkan seperti menjadi budaya bagi negara Indonesia. Namun, semakin lama masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, para pelajar pada masa ini khususnya para remaja diharapkan bisa sadar dan memahami nilai-nilai Pancasila dengan harapan Pancasila bisa meraih masa emasnya kembali (Adityo, 2022)



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia harus selalu dilindungi dan menjadi pedoman dalam berinteraksi antar individu dan kelompok yang ada. Namun nyatanya nilai-nilai Pancasila cenderung terlupakan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia saat ini. Akibatnya, arus nilai-nilai global dari berbagai belahan dunia kini mengancam eksistensi Pancasila karena adanya kebebasan yang melampaui batasnya. Eksistensi Pancasila akan terancam jika dasar negara dan keterwakilannya dalam konstitusi tidak dijadikan sebagai ukuran dan acuan dalam berpikir, merumuskan dan berperilaku sebagai pribadi warga negara, sebaliknya diserang dengan kekerasan nilai-nilai global terus menghantui negara kita (Kurniawan & Lahir, 2017).

Demi keberlangsungan eksistensi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Indonesia di era globalisasi, sudah sepatutnya kita menggali lebih dalam dan mengamalkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Pancasila mempunyai asas kekeluargaan dan gotong royong, dalam hal ini bertujuan agar generasi penerus bangsa senantiasa sadar akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia dan dapat langsung memahami dan mengamalkannya, sekaligus hakikat nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila tersebut tetap dipertahankan sebagai jajaran pengarah kebudayaan untuk negara Indonesia selamanya (Zenrif & Mustofa, 2022).

Ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila adalah suatu sistem perekonomian yang berorientasi untuk mendorong keikutsertaan semua pihak dalam kegiatan perekonomian berdasarkan falsafah Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, kemanusiaan, gotong royong, kerja sama yang baik, dan keadilan sosial. Adapun Filosofi moral ekonomi Pancasila dapat dipahami sebagai satuan ukuran atau standar ekonomi dalam mengatur pola pikir dan pola tindakan para pelaku ekonomi Pancasila (Agusalim et al., 2018). Implementasi pengembangan ekonomi Pancasila dapat diwujudkan dengan mencintai dan menggunakan produk lokal.

Sebagai negara yang memiliki dasar negara Pancasila, seharusnya seluruh unsur kehidupan didasarkan kepada Pancasila. Namun, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, sejak dahulu sistem ekonomi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berdasarkan kepada nilai Pancasila. Hal ini karena pemerintah kurang memerhatikan sistem ekonomi Pancasila. Upaya upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Pancasila yang berguna untuk mengembangkan ekonomi bangsa belum membuahkan hasil maksimal, karena kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat yang belum bekerja sama untuk mencintai produk lokal.

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sistem perekonomian yang sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa. Selain itu juga bertujuan untuk memecahkan masalah perekonomian di Indonesia supaya lebih berkembang dan menambah sisi positif bagi ekonomi bangsa. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Search*). Menurut Amir Hamzah, penelitian kepustakaan dalam dikelompokkan dalam pendekatan penelitian kualitatif, karena memiliki akar filosofis post-positivisme (Hamzah, 2022). Pembuatan Jurnal ini dengan meneliti dari beberapa sumber jurnal dan buku yang juga berfungsi sebagai sumber referensi. Hal ini dilakukan

untuk mendapatkan data penelitian yang valid tanpa memerlukan riset lapangan langsung.

Pembahasan

Jika kita membaca sejarah kelahiran Pancasila, Pancasila dijadikan sebagai perjanjian politik mengenai dasar negara yang diperlukan untuk menjaga kesatuan negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (Siregar, n.d.). Persatuan merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia karena masyarakatnya dikenal sangat majemuk, baik dari segi agama, suku, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesatuan identitas kelompok, melainkan rasa kesamaan nasib yang pada akhirnya menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk Bersatu (Siregar, n.d.).

Pengelolaan ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan pada ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Maka dari itu pengelolaan ekonomi harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikenal dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ini bersifat kekeluargaan dan kerakyatan.

Apakah sistem ekonomi saat ini sudah sesuai dengan amanat Pancasila?

Untuk melihat seberapa tingkat keberhasilan sistem ekonomi di Indonesia yang harusnya sesuai dengan amanat Pancasila, maka kita harus mengurai satu persatu dari sila-sila Pancasila dan membandingkannya dengan sistem ekonomi bangsa saat ini (Supriyanto, n.d.).

Nilai ketuhanan yang maha esa. Yang berperan untuk membentuk sosial dan moral manusia dalam sistem ekonomi di negara ini. Kebijakan pemerintah yang mencakup sila pertama adalah mempertimbangkan moral ekonomi di Indonesia dengan harapan memiliki semangat pembangunan ekonomi yang tidak mengandung unsur diskriminasi antara pemodal besar dan pemodal kecil. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia dalam hal moral masih belum terbentuk karena masih terjadi diskriminasi antara pemodal kecil dan pemodal besar, yang dengan adanya keputusan pemerintah tersebut diharap bisa memperbaiki semuanya.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki kehendak kuat bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kerataan sosial yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan. Dengan menyalurkan semangat kekeluargaan, saling sayang dan tenggang rasa akan menjadikan semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Dengan melaksanakan program kebijakan proteksi usaha kecil seperti penyampaian aspirasi oleh pemilik usaha kecil kepada pemerintah, maka perumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengusaha kecil.

Nilai persatuan Indonesia yang harus memprioritaskan kebijaksanaan ekonomi guna menciptakan perekonomian nasional yang Tangguh. Tangguh yang dimaksud adalah semangat nasionalisme di bidang ekonomi Indonesia yang tidak boleh menyurut. Penurunan tersebut terjadi karena adanya faktor pembatas akibat semakin ketatnya persaingan antara perekonomian domestik dan dunia internasional. Maka, pemerintah dalam pembuatan kebijakan ekonomi harus membawa dampak positif demi

meningkatkan ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional. Contohnya adalah dalam pembentukan kerja sama baru dengan negara lain yang harus dipikirkan kembali akan menyumbangkan ketahanan ekonomi atau malah mengancam ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang sudah berjalan baik di Indonesia dapat dilihat dari koperasi – koperasi yang berdiri di negara ini. Koperasi merupakan kelompok ekonomi yang memiliki watak sosial yang membantu melayani kepentingan anggotanya khususnya dalam upaya kesejahteraan anggotanya.

Pada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdapat masalah yang sejak lama sudah menjadi perhatian bangsa. Tujuan dari sila kelima ini adalah untuk menjadikan masyarakat yang adil dan Makmur. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan prinsip keadilan dalam seluruh aspek keadilan, yaitu hukum, ekonomi politik, sosial budaya dan etika.

Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pancasila karena kurangnya pengimplementasian nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Selain itu juga disebabkan oleh kurang tepatnya sasaran bantuan yang memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kecil atau pengusaha kecil di berbagai daerah. Begitu juga dengan kasus-kasus ekonomi yang masih sering terjadi dan selalu membawa dampak buruk bagi penduduk negerinya sendiri.

Implementasi Pancasila dalam sistem ekonomi Indonesia yang belum tercapai

Pengalaman pahit krisis moneter yang terjadi di akhir perjalanan orde baru pada tahun 1998 membuat kita sadar bahwa negara ini memerlukan sistem ekonomi mandiri. Kemandirian ekonomi tidak harus berkembang secara cepat dan pesat, karena hal ini membutuhkan proses yang bertahap. Dan yang terpenting adalah konsisten tumbuh dan terjaga kelangsungannya dalam jangka Panjang.

Sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mana kegiatan ekonominya berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Dalam ekonomi Pancasila tidak mengandung sifat serakah karena dalam Pancasila sendiri terdapat sila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Serakah yang dimaksud adalah mencari keuntungan atau termasuk didalamnya memanfaatkan material orang lain dan sumber daya yang ada. Jika begitu adanya maka ekonomi Pancasila tidak memiliki moral dan etika yang terkandung dalam sila ke-satu Pancasila.

Ekonomi Pancasila telah tercemar sejak pemerintahan orde baru yang selalu mengatakan bahwa yang diterapkan pada saat itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Tetapi pada prakteknya sistem ekonomi yang diterapkan adalah ekonomi liberal. Dengan adanya persaingan pasar bebas yang liberal pada masa itu, hasilnya kekuasaan ekonomi akan selalu dimenangkan oleh pihak yang memiliki modal lebih besar atau dari kalangan konglomerat. Hal ini merupakan penyebab terjadinya krisis moneter pada tahun 1998.

Meskipun orde baru telah hancur, akan tetapi paham ekonomi liberal masih tersisa pada beberapa sisi pemerintahan saat ini. Dibuktikan dengan para pemerintah yang

masih berpihak kepada golongan konglomerat . Namun dengan adanya gerakan ekonomi kerakyatan yang dipicu oleh semangat reformasi tidak akan menyurutkan tumbuhnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak hanya kepada sebagian rakyat, meskipun belum sepenuhnya terlaksana dan Pemerintah belum menerapkan pemerataan sistem ekonomi kerakyatan ini.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menegakkan menerapkan dengan benar sistem ekonomi Pancasila ini. Karena pemerintahlah yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah mampu mendistribusikan pendapatan dan kekayaan, baik dari negara untuk rakyat ataupun sebaliknya. Kemudian hanya pemerintah yang berhak membuat perencanaan pembangunan ekonomi dan memberikan beberapa kebijakan yang selaras bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk memanfaatkan kedudukannya dengan sewenang-wenang. Karena inilah penyebab utama tidak tercapainya tujuan utama yang telah disusun sejak awal dan cita-cita yang diharapkan. Untuk itu, pemerintah perlu menata ulang penyelenggaraan ekonomi Pancasila secara transparan dan konsisten guna mencapai cita-cita dan tujuan berdirinya bangsa Indonesia, yaitu kemakmuran dan kesejahteraan penduduk.

Pengimplementasian Pancasila guna menekan pertumbuhan ekonomi bangsa.

Kekuatan ekonomi global menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup pelaku ekonomi Indonesia di masa depan, khususnya pemilik UMKM. Mereka tidak mampu menahan serangan kekuatan ekonomi eksternal yang lebih kompetitif. Dalam situasi ini bangsa Indonesia menghadapi aspek penting di era global ini, yaitu persaingan bebas. Dalam hal ini, Pemerintah tidak bisa serta merta melarang impor produk tersebut ke pasar dalam negeri, yang dinilai merupakan pelanggaran terhadap nilai universal pasar bebas di era globalisasi. Yang bisa dilakukan adalah mendorong masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi produk dalam negeri dibandingkan produk luar negeri. Kecintaan terhadap produk dalam negeri ini merupakan wujud kelestarian negara pada masa kini.

Indonesia mempunyai banyak sekali produk lokal, tentunya kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri yang saat ini masuk ke negara kita karena proses globalisasi dan juga kebutuhan setiap negara untuk memiliki produk luar negeri. Diketahui produk luar negeri seperti teknologi sangat digemari masyarakat Indonesia yang kini menjadi konsumen produk luar negeri (Siswanto, 2017).

Indonesia tentunya harus bangga karena memiliki begitu banyak budaya yang dapat dimanfaatkan. Selain produk kain lokal, masih banyak produk lokal dari Indonesia yang pastinya juga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Bahkan, ada produk lokal yang diimpor ke luar negeri dan berhasil menarik perhatian mancanegara. Bukan hanya tertarik untuk membeli tapi bahkan ingin mengakui kepemilikannya. Tidak sedikit negara lain yang ingin merebut produk lokal Indonesia yang merupakan budaya asli bangsa ini, yakni batik.

Namun yang perlu diperhatikan lebih khusus adalah arus globalisasi yang berkembang pesat dan tidak dapat dihindari, serta penetrasi barang-barang dalam negeri yang begitu merajalela sehingga mendominasi pasar Indonesia. Mungkin

memang banyak produk dalam negeri yang diproduksi dan dikonsumsi. Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang lebih tertarik pada barang luar negeri dibandingkan produk lokal. Memang era globalisasi telah menguasai seluruh kebutuhan hidup masyarakat khususnya di Indonesia .

Pada faktanya dampak terbesar Globalisasi terjadi pada remaja, terutama pada gaya hidup yang mereka inginkan (Hainun & Dayu, 2022). Hal seperti inilah yang menyebabkan kurangnya kesadaran para remaja untuk mengkonsumsi produk lokal, dimana para remaja sangat ingin mengikuti style atau budaya luar, baik dari cara berpakaian, maupun aksesorisnya. Dari sanalah timbul rasa penasaran untuk meniru gaya hidup yang lebih dominan di masa ini dan kemudian mulai mencari objek yang mereka inginkan tersebut. Maka dari sini, produk lokal mulai kalah dari persaingan dengan produk luar tersebut.

Masyarakat memiliki alasan mengapa mereka tidak begitu menyukai produk lokal antara lain, mereka menganggap bahwa produk lokal berkualitas rendah. Mereka lebih memilih barang impor, karena pada faktanya produk impor memiliki kualitas barang yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah kurangnya peningkatan informasi logis baru sebagai bentuk penemuan dan perkembangan atau bisa dibilang keterlambatan dalam hal kemajuan teknologi (Anis Farida & Indah Yuliana, 2022). Peran pemerintah dibutuhkan disini, dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik usaha kecil menengah untuk memenuhi standar mutu produk yang sesuai (Siswanto, 2017).

Upaya pemerintah seperti Dinas Penanaman Modal telah membuka kursus pelatihan bagi para pengusaha untuk mengajari mereka cara mengemas dan memasarkan produk lokal agar dapat menembus pasar, serta membimbing Indomaret Tomy cara memasarkan produk lokal. Namun upaya tersebut masih sangat jarang dilakukan karena kantor investasi yang dibuka, baru memberikan pelatihan kepada beberapa pengusaha dan belum menghasilkan produk lokal lainnya, sehingga upaya tersebut masih kurang dan hasilnya masih belum terlihat jelas di masyarakat dan kalangan pemuda.

Alasan kedua, masyarakat menilai produk lokal kurang inovatif. Produk luar negeri kerap menghadirkan inovasi-inovasi baru untuk menarik konsumen, sedangkan perusahaan dalam negeri kerap meniru inovasi produk luar negeri, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia lebih memperhatikan dan memilih produk luar negeri.

Dalam upaya pengendalian produk impor, pada tahun 2015, pemerintah mengambil kebijakan kenaikan tarif pajak impor atas produk impor melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dimana produk yang masuk ke Indonesia merupakan produk jadi atau barang konsumsi, khususnya makanan, minuman, Sandang, Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Bea Masuk Yang Tinggi Atas Barang Impor. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.

Kesimpulan

Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia belum berjalan sesuai dengan amanat Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan setelah setiap sila-sila Pancasila diuraikan satu persatu dan diteliti lebih lanjut. Sesuai dengan sumber-sumber yang dijadikan rujukan dalam jurnal ini, alasan terkuat dan penyebab utama Sistem Ekonomi Pancasila belum terlaksana adalah masih ada bekas-bekas Sistem Ekonomi Liberal yang masih dianut oleh beberapa orang pemerintah. Pada Era Globalisasi ini, hal yang perlu ditanamkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila adalah dengan mencintai produk lokal. Karena dengan menggunakan produk lokal akan memberi keuntungan pada negara. Pada tahun 2015 pemerintah telah membuat peraturan baru, yakni menambahkan tarif pada bea masuk barang impor. Namun, upaya ini belum juga membawa hasil, karena masyarakat masih tetap menggunakan produk impor dalam jumlah yang sama. Alasan masyarakat kurang tertarik pada produk lokal adalah kualitasnya yang masih diragukan dan kurang inovatif. Maka, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2022). Penguatan dasar negara melalui penyuluhan pancasila pada mahasiswa. *Devosi*, 3(2), 1–5. <https://doi.org/10.33558/devosi.v3i2.4473>
- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2018). Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan Keberlanjutan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(01). <https://doi.org/10.31326/jks.v1i01.138>
- Anis Farida & Indah Yuliana. (2022). Pengaruh Utang Luar Negeri dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Indonesia Periode Tahun 2006-2020. *Malia*, 13(2), 181–192. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3016>
- Hainun, R., & Dayu, Y. O. (2022). Kesadaran Remaja Dalam Pengamalan Sila Ketiga Pancasila. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Hamzah, A. (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research: Kajian Filosofis, Teoritis dan Aplikasi Proses dan Hasil*. Rajawali Press.
- Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 1(02). <https://doi.org/10.29040/jie.v1i02.153>
- Siregar, C. (n.d.). *Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia*.
- Siswanto, S. (2017). Mencintai Produk Dalam Negeri Sebagai Manifestasi Bela Negara Di Era Global. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i3.231>
- Supriyanto, E. E. (n.d.). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014*.
- Zenrif, M. F., & Mustofa, M. L. (2022). Indonesian Economic Recovery after COVID-19 Pandemic: Qur'anic Paradigm in Community Economic Development. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 1–10. <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2201>